



## Analisa pemanfaatan sumber daya alam perikanan tangkap di provinsi Sulawesi Barat

Muhammad Aziz Rizal Sutisna<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran

\* Korespondensi: [azizrizal27@gmail.com](mailto:azizrizal27@gmail.com)

Tanggal Terbit: 31 Januari 2024

### Abstract

*The utilization of capture fisheries resources in West Sulawesi Province is currently at its lowest level compared to five other provinces in the Sulawesi region, although overall utilization conditions have reached fully exploited and over-exploited status. The low utilization is caused by the lack of fishing facilities and infrastructure as well as the lack of empowerment of fishermen in the province. This study aims to analyze the level of utilization of capture fisheries resources and the factors influencing them in West Sulawesi Province. The data collection method used was a survey and interviews with 50 fishermen in 5 districts/cities. The results show that the average productivity of fishermen's fishing is still very low compared to other provinces in Sulawesi. In addition to the lack of capital and infrastructure, the low level of education and skills of fishermen is also a major cause. Therefore, various efforts are needed to empower fishermen through training and capital assistance so that the utilization of capture fisheries resources can be optimal and sustainable.*

**Keywords:** fishermen; fisheries utilization; resources; sustainable

### Abstrak

Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Barat saat ini berada pada tingkat terendah dibandingkan lima provinsi lainnya di wilayah Sulawesi, meskipun secara umum kondisi pemanfaatannya telah mencapai status *fully exploited* dan *over exploited*. Rendahnya pemanfaatan ini disebabkan minimnya sarana dan prasarana penangkapan ikan serta kurangnya pemberdayaan nelayan di provinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei dan wawancara terhadap 50 nelayan di 5 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas penangkapan ikan nelayan masih sangat rendah dibandingkan provinsi lain di Sulawesi. Selain minimnya modal dan sarana prasarana, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan nelayan juga menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya pemberdayaan nelayan melalui pelatihan dan bantuan permodalan agar pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dapat optimal dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** berkelanjutan; nelayan; pemanfaatan perikanan; sumber daya

Cite This Article:

Sutisna, M. A. R. (2024). Analisa pemanfaatan sumber daya alam perikanan tangkap di provinsi Sulawesi Barat. *Journal of Earth Kingdom*, 1(2), 91-97.  
<https://doi.org/10.61511/jek.v1i2.2024.578>



Copyright: © 2024 by the authors.  
Submitted for possible open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## 1. Pendahuluan

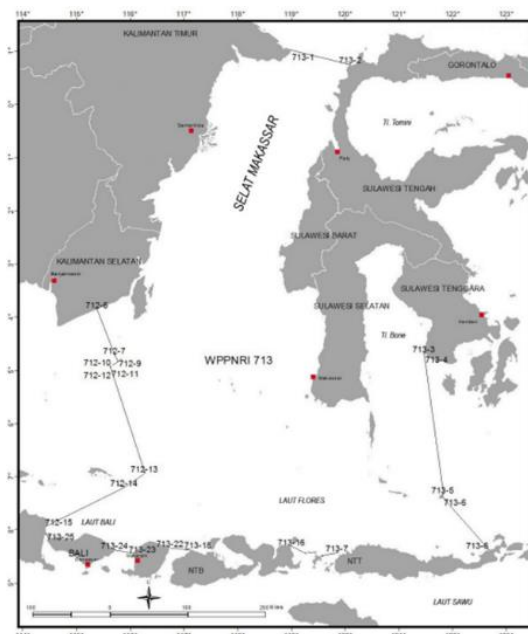
Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Barat berada di peringkat terendah dari lima provinsi di wilayah Sulawesi lainnya meskipun secara umum kondisi pemanfaatannya berstatus *fully exploited* dan *over exploited*. Minimnya sarana prasarana penangkapan ikan dan kurangnya pemberdayaan nelayan penyebab rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Barat.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### 2.1. Potensi Ekonomi Sumber Daya Perikanan Tangkap

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Sulawesi yang memiliki kewenangan dalam mengelola potensi sumber daya ikan laut yang berada di WPPNRI 713, selain memiliki potensi sumber daya ikan laut Provinsi Sulawesi Barat berada dalam wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang banyak dilintasi kapal nasional dan internasional sehingga akses transportasi dan pemasaran dapat difasilitasi dengan baik.

WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan laut Bali, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia. Secara administratif daerah provinsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 713 terdiri Dari 10 (sepuluh) provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Barat. Peta Wilayah WPPNRI 713 dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Peta WPPNRI 713

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia)

Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan, 2015), estimasi potensi sumber daya ikan untuk WPPNRI 713 sejumlah 1.026.599 ton/tahun. Dalam *Article 6.2 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, FAO 1995 “bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumberdaya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan Ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan”.

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tingkat pemanfaatan potensi sumber daya ikan di WPPNRI 713 berada pada level *fully exploited* dan *over exploited* dengan angka rata-rata pemanfaatan per jenis ikan yaitu 0,6 – 1. Angka estimasi potensi, Jumlah Tangkap yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan tersebut dikelompokkan dalam jenis ikan yang berada di WPPNRI 713 sebagaimana pada Tabel.1:

Tabel. 1 Estimasi Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Kelompok  
Sumber Daya Ikan WPPNRI 713 Tahun 2017

No	Kelompok Sumber Daya Ikan	Potensi (ton/tahun)	JTB (ton/tahun)	Tingkat Pemanfaatan	Status
1	Ikan Pelagis Kecil	104,546	83,637	0.61	<i>Fully Exploited</i>
2	Ikan Pelagis Besar	419,342	335,474	0.86	<i>Fully Exploited</i>
3	Ikan Demersal	77,238	61,790	1.04	<i>Over Exploited</i>
4	Ikan Karang	365,420	292,336	0.34	<i>Moderate</i>
5	Udang Penaeid	37,268	29,814	1.70	<i>Over Exploited</i>
6	Lobster	1,020	816	1.40	<i>Over Exploited</i>
7	Kepiting	5,016	4,013	1.59	<i>Over Exploited</i>
8	Rajungan	6,740	5,392	1.52	<i>Over Exploited</i>
9	Cumi-cumi	10,010	8,008	1.70	<i>Over Exploited</i>
10	Total	1,026,599			

(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia)

Data menunjukkan bahwa potensi sumber daya ikan di perairan WPPNRI 713 secara umum sudah masuk dalam kategori *fully exploited* bahkan ada yang berstatus *over exploited* dari jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, dengan demikian apabila potensi sumber daya ikan telah dimanfaatkan dengan optimal maka nilai ekonomi dan kesejahteraan nelayan seharusnya semakin meningkat.

## 2.2. Analisis Kebijakan

Kurangnya optimalisasi dalam mengelola potensi sumber daya perikanan masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Barat, sehingga keberadaan potensi sumber daya alam perikanan yang melimpah dirasa masih kurang berkontribusi dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Berdasarkan data statistik (BPS, 2017) jumlah armada kapal perikanan yang digunakan oleh nelayan di Provinsi Sulawesi Barat masih cenderung tradisional yaitu Perahu Tanpa Motor sejumlah 3.853 Unit dan Perahu Motor Tempel sejumlah 7.667 Unit, yang kapasitasnya diperkirakan hanya dapat digunakan untuk menangkap ikan *one day fishing* dengan jarak sejauh 3-10 Mil Laut. Menurut data (Statistik KKP, 2021) bahwa jumlah nelayan di provinsi Sulawesi barat berada di peringkat paling bawah dari 5 provinsi Sulawesi lainnya yaitu sejumlah 57.318 Jiwa, Bank Indonesia (BI, 2021) melaporkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat saat ini berada di urutan ke 5 dari 5 Provinsi di Pulau Sulawesi yang memanfaatkan potensi sumber daya perikanan tangkap, berdasarkan data (BPS, 2017) bahwa produksi perikanan tangkap provinsi Sulawesi barat hanya sekitar 56.100 ton, dari potensi estimasi 1.026.599 ton.

Disamping kuantitas dan kualitas armada kapal perikanan yang belum memadai, keberadaan *cold chain system* dalam aktifitas perekonomian di bidang penangkapan ikan untuk menjaga mutu hasil tangkapan ikan sangat mempengaruhi nilai produksi ikan, sehingga ikan hasil tangkapan para nelayan dibeli dengan harga yang tinggi dan dapat menutupi biaya produksi. Adapun jumlah produksi ikan pada Provinsi Sulawesi lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Produksi Ikan dan Pelabuhan Perikanan  
Per Provinsi di Sulawesi Tahun 2017

No	Provinsi	Jumlah Produksi Ikan Potensi (ton/tahun)	Nilai Produksi Ikan Potensi (juta/tahun)	Jumlah Pelabuhan Perikanan
1	Sulawesi Selatan	715,287,40	14.813.225.000	47
2	Sulawesi Tengah	174,794,20	4.254.329.435	31
3	Sulawesi Tenggara	146,323	-	25
4	Sulawesi Utara	285,265.80	-	14
5	Sulawesi Barat	56,100	-	6

(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 dan  
BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2017)

Menurut data yang disajikan pada Tabel.2, jumlah produksi ikan pertahun tertinggi berada di Sulawesi Selatan sejumlah 715.287.40 ton dengan nilai produksi Rp. 14.813.225.000 yang juga didukung dengan jumlah pelabuhan perikanan terbanyak yaitu 47 unit. Sehingga dengan semakin banyaknya jumlah produksi ikan yang ditangkap maka nelayan diwilayah tersebut mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Sulawesi Barat yang memproduksi ikan dari hasil perikanan tangkap yaitu sejumlah 56.100 ton dan memiliki 6 unit pelabuhan perikanan yang tentunya berdampak pada nilai ekonomi dan juga lapangan usaha.

BPS Sulawesi Barat mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat 2013-2017 untuk komoditas Perikanan berada di tingkat kedua dari tiga komoditas yaitu pertanian dan kehutanan. Berdasarkan data tersebut komoditas Pertanian dan kelompoknya berada di tingkat tertinggi dengan nilai presentase 31,25% pada tahun 2013 meskipun pada tahun 2017 menurun dengan nilai 30,12%, pada tingkat kedua yaitu komoditas perikanan dengan nilai presentase 10,65% pada tahun 2013 dan meningkat di tahun 2017 dengan nilai 11,9%, untuk komoditas terakhir yaitu kehutanan dengan nilai presentase di tahun 2013 sebesar 0,38% dan terus menurun hingga tahun 2017 yaitu sebesar 0,32%. Secara lengkap PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat disampaikan dalam Tabel. 3

Tabel. 3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat 2013-2017

<b>Tabel 4.1.</b>	<b>Peranan Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian Terhadap perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat (Persen), 2013-2017</b>				
<b>Table 4.1.</b>	<b>Share of Agriculture, Livestock, Hunting, and Agriculture Service Category to Economy in Sulawesi Barat Province (Percent), 2013–2017</b>				
Lapangan Usaha/Industry	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>	31,25	30,71	30,84	30,34	30,12
a. Tanaman Pangan / <i>Food Crops</i>	3,75	3,73	3,53	4,25	5,05
b. Tanaman Hortikultura/ <i>Horticultural Crops</i>	3,87	3,38	3,75	3,97	3,51
c. Tanaman Perkebunan/ <i>Plantation Crops</i>	20,89	20,97	20,99	19,57	19,05
d. Peternakan/ <i>Livestock</i>	1,93	1,83	1,80	1,80	1,79
e. Jasa Pertanian dan Perburuan/ <i>Agriculture Services and Hunting</i>	0,81	0,80	0,77	0,75	0,73
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ <i>Forestry and Logging</i>	0,38	0,35	0,35	0,34	0,32
3 Perikanan/ <i>Fishery</i>	10,65	10,70	10,80	10,81	11,09
<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/<i>Agriculture, Forestry and Fishing</i></b>	<b>42,28</b>	<b>41,76</b>	<b>41,99</b>	<b>41,49</b>	<b>41,53</b>

(Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat)

Apabila pemanfaatan potensi sumber daya perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Barat dioptimalkan maka peningkatan nilai ekonomi dari subsector perikanan tangkap dapat meningkat.

### 3. Kesimpulan

Sumber Daya Alam Perikanan merupakan salah satu potensi ekonomi yang memerlukan pengelolaan dengan baik dan bertanggungjawab untuk menjaga agar tetap lestari dan berkelanjutan dalam memberikan manfaat bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan keseimbangan ekosistem laut. Dari letak geografisnya potensi sumber daya alam perikanan Provinsi Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713 meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali dengan potensi jenis sumber daya ikan yang terdiri dari 9 (Sembilan) Jenis ikan meliputi: Ikan Pelagis Kecil, Ikan Pelagis Besar, Ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, Lobster, Kepiting, Rajungan dan Cumi-Cumi.

Data menunjukkan bahwa jumlah potensi sumber daya ikan pada WPPNRI 713 dari total keseluruhan 9 (Sembilan) jenis ikan tersebut pada tahun 2015 sekitar 1.026.599 ton dan hampir seluruhnya dalam status ter eksploitasi dan eksplotasi berlebih namun ironisnya Provinsi Barat berdasarkan data tahun 2017 hanya memanfaatkan sejumlah 56.100 Ton. Provinsi Sulawesi Barat berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan alur laut strategis karena banyak dilalui oleh Kapal Internasional, dengan minimnya pemanfaatan potensi sumber daya perikanan tangkap oleh Provinsi Sulawesi Barat seolah melewatkan kesempatan dan potensi yang ada, sehingga untuk lebih meningkatkan pemanfaatannya perlu dilakukan upaya pembenahan dari aspek sarana prasarana dan pemberdayaan nelayan agar potensi sumber daya perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Barat dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan bertanggungjawab.



Besarnya potensi sumber daya perikanan tangkap yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat dan tingkat kapasitasnya untuk memanfaatkan potensi tersebut sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, perlu menyusun beberapa rekomendasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diantaranya: merevitalisasi armada kapal perikanan dan meningkatkan kapasitas nelayan melalui pembentukan kelompok nelayan dan pendampingan dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

### **Kontribusi Penulis**

Konseptualisasi, M.A.R.S.; Metodologi, M.A.R.S.; Perangkat lunak, M.A.R.S.; Validasi, M.A.R.S.; Analisis Formal, M.A.R.S.; Investigasi, M.A.R.S.; Resources, M.A.R.S.; Kurasi Data, M.A.R.S.; Menulis-Penyusunan Draf Asli, M.A.R.S.; Penulisan-Tinjauan & Penyuntingan, M.A.R.S.; Visualisasi, M.A.R.S.

### **Pendanaan**

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

### **Pernyataan Dewan Peninjau Etis**

Tidak berlaku.

### **Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan**

Tidak berlaku.

### **Pernyataan Ketersediaan Data**

Tidak berlaku.

### **Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

### **Referensi**

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2017). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat 2013-2017. Sulawesi Barat. <https://sulbar.bps.go.id/publication/2022/04/05/9928600f73bddc9421039d52/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-sulawesi-barat-menurut-lapangan-usaha-2017-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2017). Produksi Perikanan Tangkap. Sulawesi Barat. <https://sulbar.bps.go.id/indicator/56/347/1/produksi-perikanan-tangkap.html>
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat. (2021). Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. Statistik Perikanan Tangkap 2017. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta. <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=publikasi&i=214>
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/159734/kepmen-kekp-no-47kepmen-kp2016-tahun-2016>
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/152320/Kepmen%20KKP%20Nomor%2080>

[%20Tahun%202016.pdf](#)

Peraturan Daerah Provinsi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/75864/perda-prov-sulawesi-barat-no-8-tahun-2017>

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/150792/Permen%20KKP%20Nomor%2018%20Tahun%202014.pdf>